

Memikirkan Kembali Ahlussunnah Waljama'ah NU

Wacana Ahlussunnah Waljama'ah terutama eksistensinya sebagai landasan ajaran Nahdlatul Ulama (NU) akhir-akhir ini mengemuka kembali setelah beberapa puluh bahkan ratusan tahun tidak pernah dikutik-kutik lagi. Ini merupakan gejala baru setelah Ahlussunnah Waljama'ah — selanjutnya disingkat Aswaja — diperlakukan sebagai sebuah ortodoksi yang hampir tidak pernah mengalami gugatan serius. Adalah suatu terobosan berani yang dilakukan oleh Said Agil Siraj karena dia merupakan orang yang pertama melakukan kritik dari dalam (otokritik) terhadap faham Ahlussunnah Waljama'ah menurut cara yang agak keras, paling tidak menurut kalangan ulama NU yang mengikuti faham ini. Kritik terhadap Aswaja NU memang sering muncul tapi biasanya berasal dari luar NU.

Runtuhnya Narasi Besar, Munculnya Narasi Kecil

Mengapa setiap kali membicarakan Aswaja selalu kembali kepada nama Asy'ari? Apakah hanya Asy'ari dan pengikutnya saja yang bisa mengklaim dirinya sebagai Aswaja?

Perdebatan mengenai siapakah yang berhak dikatakan sebagai pengikut Aswaja dan bukan, memang sudah menjadi bahan pembicaraan di kalangan *mutakallimin* berabad-abad yang lalu. Setiap firqah dalam Islam akan saling mengklaim bahwa diri merekalah, yang sebenarnya sebagai pengikut Aswaja. Dalam hal ini, biasanya, kalau kita membicarakan Aswaja akan pecah menjadi dua. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Aswaja sudah ada semenjak zaman para sahabat Nabi dan tabi'in yang biasa disebut dengan generasi *salaf*. Pendapat ini didasarkan pada pengertian istilah Ahlussunnah Waljama'ah secara generik yakni mereka yang selalu mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Ahlussunnah Waljama'ah adalah faham keagamaan Islam yang baru ada setelah munculnya rumusan teologi dari Asy'ari dan Maturidi

dalam bidang teologi, rumusan *fihiyyah* madzhab empat dalam bidang fikih serta rumusan tasawwuf Junaid al-Baghdadi dalam bidang tasawwuf.

Istilah *sunnah* sendiri mempunyai dua arti, pertama, jalan. Maksudnya apabila dikatakan Ahlussunnah maka yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti jalan sahabat dan tabi'in dalam menerima ayat-ayat *mutasyabihat* dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Kedua, *sunnah* berarti hadis. Artinya meroka yang percaya akan kebenaran hadis Nabi tanpa banyak melakukan penta'wilan sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah.

Terlepas dari persoalan terminologis di atas, kehadiran Asy'ari mendobrak hegemoni dan dominasi Mu'tazilah merupakan gejala yang menarik untuk diteliti terutama proses konversi Asy'ari dari genggaman narasi besarnya (*grandnarrative*), Mu'tazilah. Proses konversi ini menjadi minat kajian para ahli sejarah pemikiran Islam terutama sebab-sebab intrinsiknya. Jalal Muhammad Abdul Hamid Musa misalnya melihat proses konversi tersebut lebih dilatarbelakangi oleh kondisi spiritual Asy'ari yang hidup dalam dua dunia aliran pemikiran (*school of thought*) yang berbeda. Asy'ari dalam bidang teologi berguru kepada al-Jubba'i dan dalam bidang fikih berguru kepada Abu Ishaq al-Mawarzi (w. 340 H). Pada saat itu Asy'ari merasakan bahwa dua kutub — aliran kalam (teologi) dan aliran hadis (*ahlul hadis*)— yang diyakininya telah menyebabkan timbulnya polarisasi di kalangan umat Islam. Aliran pertama lebih menekankan kepada penggunaan rasio dalam memahami teks-teks keagamaan sedangkan aliran kedua lebih cenderung menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami teks-teks tersebut.

Didorong oleh keinginannya untuk mengeliminir polarisasi tersebut Asy'ari berusaha tampil ke depan melakukan moderasi dan konvergensi atas kedua aliran tersebut dengan membentuk aliran Aswaja. Namun demikian,

simpatinya terhadap paham salaf tidak pelak tercium juga. Dalam beberapa kesempatan misalnya Asy'ari sendiri mengaku bahwa dirinya adalah pengikut mazhab salaf Ibnu Hambal. Meski pengikut Ibnu Hambal justru menolak mengakui Asy'ari sebagai pengikut mazhab mereka.

Dilihat dari sudut pandang filsafat strukturalisme kebangkitan Asy'ari untuk menggulingkan Mu'tazilah adalah merupakan kebangkitan perlawanan narasi kecil terhadap narasi besar (*grandnarrative*) yang saat itu direpresentasikan oleh Mu'tazilah. Asy'ari melakukan proses *decentering* dari wacana Mu'tazilah. Hal ini dikarenakan sebagai sebuah wacana, Mu'tazilah sudah menjelma menjadi pusat penentu dari wacana-wacana yang ada. Mu'tazilah dalam hal ini merupakan wacana dominan yang meminggirkan wacana-wacana lain yang tidak dominan. Ibarat lingkaran, Mu'tazilah merupakan titik tengah lingkaran tersebut.

Melalui kekuatan naratifnya Mu'tazilisme meresap ke dalam sistem kekuasaan, imajinasi dan kesadaran orang. Bukankah wacana berjaln erat dengan kekuasaan? Begitu yang dikatakan oleh Michael Foucault. Proses penyerapan diskursif ini sesuai dengan wataknya terjadi secara halus dan tidak disadari.

Sebagai satu-satunya pemilik, atau jika menggunakan istilah Jaques Lacan, sebagai *center* kebenaran, Mu'tazilah telah memproduksi aturan-aturan menurut caranya sendiri. Selain itu, Mu'tazilah mendudukkan diri sebagai hakim atas setiap paham yang ada di luarnya. Ia memfonis "yang lain" sebagai keluar dari *mainstream* kebenaran ataukah masih di dalam lingkup kebenaran. Sebagaimana diketahui, Mu'tazilisme merupakan paham resmi yang dipakai oleh regim Abbasiyah. Melalui regim ini Mu'tazilah tidak lagi hanya berfungsi sebagai paham keagamaan akan tetapi bertindak sebagai penguasa.

Kondisi yang monopolistik dan hegemonik ini mendorong Asy'ari untuk bangkit melakukan perlawanan. Sebagai seorang intelektual Asy'ari menyadari benar adanya heterodoksi teologis yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Asy'ari berusaha bangkit melakukan pencairan suasana yang serba Mu'tazilisme. Namun yang perlu ditanyakan di sini adalah apakah perlawanan Asy'ari terhadap Mu'tazilah itu merupakan gerakan teologis ataukah merupakan gerakan politik? Kalau gerakan Asy'ari itu bermotif teologis berarti memang ada yang salah dengan Mu'tazilah. Tapi kalau

gerakan Asy'ari itu bermotif politik maka keberadaan teologi hanya dijadikan sebagai justifikasi saja. Namun, pertanyaan ini masih perlu "dipertanyakan".

Menurut catatan Montgomery Watt, selain alasan teologis (akidah), perlawanan Asy'ari terhadap Mu'tazilah disebabkan juga oleh kekecewaan Asy'ari terhadap Mu'tazilah yang sudah tidak lagi mengembangkan misi yang diembannya.

Tapi sayangnya proses moderasi dan konvergensi yang dilakukan oleh Asy'ari dibekukan sedemikian rupa sehingga menjelma menjadi sebuah ortodoksi. Upaya Asy'ari untuk mencairkan ortodoksi yang telah diciptakan oleh Mu'tazilah, ternyata ditindaklanjuti dengan ortodoksi lain dengan nama Ahlussunnah Waljama'ah oleh pengikut-pengikut Asy'ari. Dari sini sebenarnya mulai terjadi proses pelembagaan dari ajaran yang bersifat terbuka kepada paham yang bersifat tertutup.

Aswaja NU, Wacana Indonesia

Bisa dikatakan bahwa kedatangan Aswaja di Indonesia bergandengan bahkan bersamaan dengan datangnya Islam di Indonesia. Dari catatan pelbagai teori masuknya Islam ke Nusantara, bahwa Islam yang masuk ke Indonesia sudah bukan lagi Islam orisinal sebagaimana dikembangkan pada zaman Rasulullah, akan tetapi sudah mengalami perkembangan dan pengemasan dalam pelbagai aliran. Kebetulan Islam yang datang ke Indonesia sudah terkemas dengan madzhab fikih tertentu seperti madzhab Syafi'i dan atau Hanafi.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi gagasan Aswaja ke bumi Indonesia sudah terjadi sejak awal datangnya Islam. Transmisi gagasan ini dikembangkan dan dilestarikan oleh ulama-ulama penyebar Islam terutama para Wali dan para kyai. Di pulau Jawa, misalnya, peranan Walisongo sangat berpengaruh dalam memantapkan eksistensi Aswaja. Sampai suatu ketika terjadi proses pelembagaan dari ajaran Ahlussunnah Waljama'ah menuju paham Ahlussunnah Waljama'ah dengan karakter khas yang mengalami puncaknya dengan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 atas pelopor ulama kharismatis dari Jawa Timur KH. Hasyim Asy'ari. Adalah Nahdlatul Ulama, sebagai satu-satunya organisasi keagamaan yang secara formal dan normatif mendudukkan Aswaja sebagai paham yang diartutnya. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan satu-satunya organisasi keagamaan yang dengan sadar mengklaim dirinya sebagai

representasi dari faham Ahlussunnah Waljama'ah yang sebenarnya dan seutuhnya. Tapi juga perlu diingat bahwa di luar NU juga ada organisasi keagamaan lain yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Aswaja yang paling benar pula.

Selama ini yang kita kenal dengan pengertian faham Aswaja yang dimaksud di kalangan NU adalah beragama Islam dengan mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi dalam pengamalan akidah (teologi), mengikuti mazhab empat dalam pengamalan fikih dan mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dalam pengamalan tasawwuf.

Bagaimana konsep Aswaja dalam NU yang sebenarnya pernah dirumuskan oleh Kyai Hasyim Asy'ari? Berbicara mengenai Aswaja di Indonesia memang tidak bisa terlepas dari Hadratusyaikh Hasyim Asy'ari. Mau tidak mau kita harus membuka sumber naratif yang paling otentik dari pelebagaan Aswaja dalam Nahdhatul Ulama. Sedangkan satu-satunya dokumen yang tertinggal mengenai perumusan Aswaja ala NU adalah terungkap dalam kitab *Qanun Asasi li Jami'ati Nahdlatul Ulama*.

Qanun Asasi ini merupakan tulisan langsung dari Kyai Hasyim Asy'ari yang berisi tiga bagian pokok. Pertama, memuat landasan pokok partai Nahdlatul Ulama yang terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an pilihan. Kedua, menjelaskan keharusan mengikuti mazhab empat. Ketiga, berisi 40 hadis Nabi pilihan. Dalam *Qanun Asasi* Kyai Hasyim Asy'ari tidak mengemukakan secara eksplisit definisi (*ta'rif*) Aswaja sebagaimana definisi yang kita pahami selama ini. Kyai Hasyim hanya mengemukakan mengenai keharusan bagi warga Ahlussunnah Waljama'ah untuk berpegang pada mazhab fikih yang empat. Namun demikian, beliau juga memberi alasan yang rasional mengapa orang harus mengikuti mazhab tertentu. Hidup bermadzhab menurutnya akan mendatangkan *mashlahah* (kebaikan), sedangkan sebaliknya, hidup tak bermadzhab akan mendatangkan kemalapetakaan. Perlu dicatat bahwa kepengikutan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mampu menggali hukum dari sumber aslinya, al-Qur'an dan Hadits setingkat para mujtahid. Kehidupan bermadzhab ini juga harus dilakukan secara kritis. Kita tidak boleh bermadzhab tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian yang mendalam mengenai mazhab yang kita ikuti meliputi otentisitasnya, validitas metodologi pemetikan hukumnya serta kredibilitas tokohnya.

Kemudian Kyai Hasyim, dalam hal ini, tidak semata-mata memberikan gambaran mengenai keberadaan empat mazhab saja, akan tetapi juga menyinggung mazhab-mazhab lainnya seperti Syi'ah Zaidiyah, Mazdhab Dawud Dhahiri, Sofyan Ast-Sauri dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa beliau melakukan proses selektivitas yang ketat dalam hidup bermadzhab. Dari ke sekian banyak mazhab yang dipaparkannya, menurut beliau hanya mazhab fikih yang empat (*madzhab al-arba'ah*) yang memiliki landasan kuat, paling tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya karena kejelasan kodifikasinya. Dengan demikian Kyai Hasyim Asy'ari tidak melakukan klaim kebenaran atas faham yang dianutnya secara membabi buta akan tetapi dilakukan menurut pertimbangan ilmiah, rasional dan efisien.

Hal yang menarik lagi, dalam *Qanun Asasi* tersebut Kyai Hasyim tidak pernah menyebut tentang landasan teologis (akidah) dan tasawwuf yang harus dipegang oleh pengikut Ahlussunnah Waljama'ah (NU). Bahkan nama-nama seperti Asy'ari dan Maturidi serta Junaid al-Baghdadi juga tidak disebut dalam *Qanun*. Justru yang sering disebut oleh Beliau adalah istilah *salaf* yang mana istilah tersebut nampaknya mengacu kepada generasi sahabat, *tabi'in* serta *tabi'it tabi'in*. Dengan demikian Aswaja rumusan Kyai Hasyim sebenarnya merupakan diskursus inklusif (terbuka). Dengan rumusan tersebut, yang dinamakan Aswaja nantinya bukan saja orang-orang yang secara teologis mengikuti Asy'ari dan Maturidi serta secara tasawwuf mengikuti Junaid al-Baghdadi saja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terbuka juga bagi faham lain yang secara teologis memiliki akar pijakan yang berbeda, tapi secara fihiyyah memiliki akar yang sama yakni mengikuti empat mazhab fikih. Kelenturan ini terrefleksi dari rumusan Aswaja Kyai Hasyim yang lebih menitikberatkan pada konsideransi (pertimbangan) fihiyyah dari pada teologi. Kita tahu bahwa perbedaan dalam bidang fihiyyah lebih bersifat terbuka dan toleran dibandingkan dengan perbedaan dalam bidang teologi.

Rumusan Aswaja sebagai faham yang mengikuti empat mazhab dalam bidang fikih, mengikuti Imam al-Asy'ari dan Maturidi dalam bidang akidah dan mengikuti Junaid al-Baghdadi dalam bidang tasawwuf baru kemudian dikemukakan oleh Kyai Bisri Musthofa.

Senada dengan KH. Bisri Musthofa, apa yang dikemukakan oleh KH. Abul Fadhol Ibnu Abdul Syakur Senori Bangil dalam *al-Kawakibul Lama'ah li Tahqiq bi Ahlis Sunnah Waljama'ah*.

Kitab ini sangat penting untuk dilihat. Karena kitab ini paling tidak turut andil dalam melembagakan Aswaja dalam kognisi masyarakat Islam Indonesia. Dalam *Tambihnya* direkomendasikan agar seluruh sekolah yang bernaung di bawah bendera Ahlussunnah Waljama'ah mengkajinya supaya para murid tercerahkan dengan sinar kebenaran. Yang dimaksud dengan sinar kebenaran (*nurul haq*) di sini tidak lain adalah Ahlussunnah Waljama'ah.

Dalam *Mukaddimah* kitab ini, Kyai Abul Fadhol memulai proses pengembangan Aswaja dengan cara menerangkan sejarah asal muasal perpecahan umat Islam. Menurutnya, pada mulanya umat Islam merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tindakan maupun kepercayaan. Ini terjadi pada masa Nabi Muhammad dan dua *khulafa al-rasyidun* yang pertama. Gejala perpecahan dimulai dari khalifah Utsman dan Ali bin Abu Thalib. Pada masa Ali perpecahan demikian nampak sehingga mulai muncul firqah-firqah. Pertama, firqah Khawarij (oposisi) yang muncul karena ketidakpuasannya kepada kepemimpinan Ali. Kemudian muncul firqah yang sebaliknya, Syi'ah, yakni firqah yang dikenal sangat cinta dan membela Ali. Kedua firqah ini pecah ke dalam faksi-faksi yang lebih kecil lagi di mana masing-masing membela pandangannya sendiri-sendiri. Menyusul kedua firqah tersebut muncul lagi satu firqah yang menamai dirinya sebagai *ahlul adli wa tauhid* (pembela keadilan dan ketauhidan). Menurut Kyai Abul Fadhol Senori, setelah tiga firqah tersebut muncul firqah Aswaja yakni suatu firqah yang senantiasa mengikuti jalan Nabi dan sahabat dalam hal kepercayaan keagamaan, praktek keagamaan serta etika hati. Dari firqah Aswaja ini muncul tiga kelompok; pertama kelompok yang mengkaji persoalan-persoalan teologis disebut dengan istilah *mutakallimin*; kedua, kelompok yang mendalami persoalan fihiyyah disebut dengan *fuqoha'* dan ketiga kelompok yang mendalami hadis-hadis Nabi disebut dengan *muhaddisin* serta kelompok yang mendalami etika dan moralitas kemanusiaan disebut dengan *sufi*.

Dari kelompok fihiyyah ini yang diklaim sebagai pengikut faham Aswaja adalah madzhab empat. Para fuqoha' ini tidak terlibat terlalu banyak dalam perdebatan persoalan teologi dan etika karena pada masa mereka persoalan tersebut belum memuncak. Baru setelah zaman mazhab fikih empat persoalan teologi memuncak. Dan generasi yang muncul sebagai penerus ide kaum salaf, dua teolog besar yakni Asy'ari dan Maturidi. Menurut Kyai Senori dua

orang inilah yang melakukan pembelaan secara serius terhadap sunnah Nabi dan sahabatnya. Maka pantaslah untuk disebut sebagai *the founding father* Aswaja. Dari dua orang inilah ditentukan definisi Aswaja secara pasti. Kyai Senori memberikan kesimpulan bahwa selama ahli hadis maupun ahli tasawwuf tidak bertentangan dengan kedua imam tersebut maka dia termasuk dalam faham Ahlussunnah Waljama'ah. Jadi pendefinisian Aswaja sangat tergantung kepada apakah sebuah pemikiran akur atau tidak dengan pemikiran Asy'ari dan Maturidi. Jelas di sini terjadi pengetatan definisi dari pengertian Aswaja yang diberikan oleh Kyai Hasyim yang hanya didasarkan pada *madzhabul arba'ah* kepada pengertian Aswaja yang diberikan oleh Kyai Abul Fadhol yang ditambah dengan aspek teologi. Namun demikian, sampai di sini belum disebut mengenai landasan tasawwufnya.

Dengan demikian proses pembakuan definisi Aswaja NU belum terjadi pada masa NU di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari. Boleh terjadi yang berkembang dalam Aswaja NU bukan konsep yang dikembangkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, tetapi rumusan yang dikembangkan (atau yang disempitkan) oleh sahabat-sahabat dan murid-murid beliau. Dan inilah yang justru dikenal oleh masyarakat. Konon, rumusan Aswaja definitif belum pernah diusulkan dalam muktamar NU. Kalau memang begitu, maka sebenarnya yang dianut oleh masyarakat nahdliyyin sekarang adalah Aswaja NU kultural karena proses pelembagaannya tidak melalui jalur-jalur kelembagaan yang struktural.

Lalu persoalannya di sini adalah apakah yang dirumuskan oleh Kyai Hasyim dan sahabat-sahabatnya sesuai dengan faham Aswaja yang sebenarnya? Pertanyaan ada tentu dengan tetap tidak lupa bahwa mana yang benar dan mana yang salah pada dasarnya bukan menjadi otoritas akal seseorang atau kelompok tertentu. Tapi yang jelas rumusan Aswaja yang dirumuskan oleh Kyai Hasyim bisa lebih kontekstual karena standarnya yang sangat fihiyyah. Sedangkan yang dikembangkan oleh sahabat-sahabat beliau mungkin agak kaku karena definisinya yang sangat ketat terutama penekanannya pada segi teologisnya. Tapi menurut dugaan, mengapa para sahabat beliau merumuskan Aswaja NU dengan tiga kategori tersebut sudah barang tentu merupakan hasil analisis dan bacaan mereka terhadap KH. Hasyim Asy'ari sebagai sebuah diskursus yang *interpretable* oleh siapapun.

Apapun pendefinisianya, yang jelas sudah

terjadi pelembagaan dan pembakuan terhadap apa yang dinamakan Aswaja. Karena itu setidaknya ada implikasi dari definisi Aswaja yang dilakukan oleh kalangan NU tersebut. Pertama, definisi tersebut bisa merupakan perluasan dari definisi yang ada. Kedua, bisa terjadi sebaliknya yakni merupakan penyempitan dari maknanya yang semula.

Definisi Aswaja mengalami perluasan karena secara historis istilah Ahlul-sunnah Waljama'ah merupakan konsep yang sama sekali lain dari yang dikehendaki oleh ulama-ulama NU di atas. Menurut sejarah Aswaja sebagai faham belum dikenal pada masa Asy'ari. Dari murid-murid Asy'ari sendiripun seperti al-Baqillani (w. 403 H), al-Baghdadi (w. 429 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H) dan Syihristani (w. 548 H) belum pernah secara eksplisit menyebutkan terminologi tersebut. Bahkan pengakuan secara eksplisit adanya faham Aswaja baru dikemukakan seorang ulama yang sudah jauh dari masa Asy'ari yaitu oleh al-Zabidi (w. 1205 H). Al-Zabidi mengatakan apabila disebut Aswaja maka yang dimaksud adalah pengikut Asy'ari dan al-Maturidi. Ini berarti secara terminologis mengalami perkembangan jangkauan ke masa setelahnya Asy'ari dan kawan-kawan.

Ia mengalami penyempitan karena Aswaja sebagai sebuah terminologi ajaran yang seharusnya berlaku terbuka (inklusif), tidak memihak dan demokratis telah direduksi dalam suatu pemahaman yang sempit. Sebagai sebuah ide Aswaja sebenarnya terlalu sempit kalau hanya didefinisikan sebagai pengikut empat mazhab fikih, pengikut Asy'ari dan Maturidi serta pengikut Junaid al-Baghdadi. Meminjam analisis Mohammed Arkoun bahwa pen-
definisan Aswaja sebagaimana yang dilakukan oleh ulama NU berarti sudah melakukan proses rigiditasi dan dogmatisasi sebuah ajaran.

Sebenarnya kalau kita bisa memahami konteks historis mengapa Kyai Hasyim Asy'ari merumuskan Aswaja sebagai landasan bagi NU seperti di atas maka kita tidak akan berpikir hitam putih. Pelembagaan Aswaja dalam NU tidak bisa terlepas dari konteks di mana dan pada saat apa ide tersebut muncul. Selain tantangan kolonialisme, pada saat itu telah terjadi tantangan kebangkitan modernisme untuk yang pertama kali di Indonesia di mana unsur-unsur tradisional dalam keagamaan diusahakan untuk dipinggirkan. Kebangkitan modernisme tersebut merupakan pengaruh gerakan pembaharuan di Mesir dan Timur Tengah pada umumnya seperti yang dilakukan

oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Mohammad bin Abdul Wahhab. Gerakan pembaharuan ini mengutamakan pelaksanaan Islam secara puritan. Gerakan modernisme Islam tersebut ditransmisikan oleh ulama-ulama Indonesia yang belajar di Timur Tengah. Kondisi yang demikian ini diresponsi oleh Kyai Hasyim dengan cara melembagakan Aswaja dalam NU. Pelembagaan yang dilakukan oleh Kyai Hasyim sebenarnya merupakan upaya perlindungan terhadap keberagaman rakyat yang dalam mengamalkan praktik-praktik keagamaannya masih banyak berbaur dengan tradisi-tradisi di sekitarnya. Keberagaman rakyat, sebagaimana diketahui, adalah sangat dekat sekali dengan tradisi-tradisi lokal. Meminjam istilah Ernest Gellner pelembagaan Aswaja dalam NU adalah merupakan pembelaan *low Islam* atau agama rakyat.

Keprihatinan Kyai Hasyim akan situasi dan kondisi yang terjadi nampak sekali apabila kita membaca dengan seksama *Qanun Asasi* yang ditulisnya. Dalam sebuah alenia KH. Hasyim mengatakan dengan jelas:

"Wahai para ulama sekalian, ketahuilah! Bahwa sesungguhnya ada segolongan dari orang-orang yang telah dengan sengaja terjun di lautan fitnah dan mereka telah melakukan bid'ah, artinya melakukan sesuatu di luar ajaran/sunnah Rasulullah. Sekalipun demikian orang-orang yang benar dan tahu akan kebenaran bahkan bersikap diam dan membiarkannya keadaan yang demikian itu merajalela, mereka dengan seandainya saja memutarbalikkan kenyataan dan kebenaran bahkan diingkari dan yang mungkin dijalan. Mereka kelihatannya mengajak orang untuk kembali kepada Kitabullah, pada ajaran al-Qur'an, tetapi pada hakikatnya mereka sendiri sama sekali tidak berbuat demikian."

Berikutnya KH. Hasyim melanjutkan:

"Mereka para ahli bid'ah tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja dan bahkan mereka mendirikan perkumpulan/organisasi untuk memperluas usaha gerakannya itu, maka dengan demikian berhamburanlah debu-debu kegelapan sehingga bagi orang-orang yang tidak menerima hidayah Allah pasti tertarik mengikuti organisasi yang didirikan oleh mereka itu."

Jelas kalau kita amati pernyataan Had-ratussyaikh tersebut yang menjadi sasaran tembak dari pernyataan itu adalah gerakan pembaharuan Islam. Pada saat itu kaum modernis memang sedang gencar-gencarnya melakukan konsolidasi pembaharuannya dengan cara membentuk organisasi-organisasi keagamaan. Maka sebagai *counter* terhadap mereka KH. Hasyim mendirikan NU. Melihat bahaya modernisme Islam, beliau menyeru kepada kaum ulama dan umat Islam pada umumnya agar masuk ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Dan secara jelas dinyatakan oleh KH. Hasyim bahwa landasan NU adalah keadilan dan kebenaran memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Sulit untuk membantah berdirinya NU terlepas dari tindakan anti pembaharuan. Namun demikian ini bukan merupakan satu-satunya faktor. Kalau kita melihat latar belakang kultural dan politik serta tujuan mengapa NU dirikan, nampak di sana bahwa pada sejarah awalnya, NU tidak semata fakta religius akan tetapi ada fakta sosial politik yang lebih kongkrit.

Lebih lanjut Nahdlatul Ulama berdiri tidak hanya untuk melayani kepentingan kelompok tertentu akan tetapi untuk kepentingan umat. Istilah *ummat* merupakan pilihan yang tepat untuk menggambarkan semangat universalitas dan kebersamaan. Hal ini semakin nampak apabila kita melihat 10 program perjuangan NU tidak satupun pasal yang mengemukakan demi kepentingan kaum Nahdiyyin. Tapi ajaran NU yang berwatak inklusif tersebut pada masa-masa selanjutnya menjadi demikian tertutup. Pokoknya selain orang yang mengikuti Asy'ari dan Maturidi dan Mazhab fikih empat bukan Aswaja dan bukan NU. Eksklusivitas ini diakibatkan oleh peranan para kyai sebagai penjaga ortodoksi yang demikian kuatnya. Keberadaan kyai tersebut seolah-olah menjadi birokrat bagi ajaran Aswaja. Dalam istilah Max Weber, sosiolog terkemuka, mereka disebut sebagai *les gestionnaires du sacre*. Karena penjagaannya terhadap ajarannya dari perubahan begitu ketat ibarat seorang birokrat yang penjaga kekuasaan.

Sampai sekarang nampaknya belum ada perubahan yang cukup berarti. Mungkin kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid dalam satu dekade terakhir cukup membawa perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan masa kepemimpinan NU terdahulu. Meskipun sudah cukup berhasil, setiap upaya untuk melakukan pertanyaan ulang terhadap Aswaja selalu mendapat tantangan dari kalangan kyai. Sebenarnya lapisan masyarakat yang paling bawah tidak akan merasa keberatan apabila para kyainya, sebagai penjaga ortodoksi, mempunyai keinginan untuk melakukan rekonstruksi Aswaja.

Aswaja NU dan Wacana Kontemporer

Persoalannya adalah apakah konstruksi teologis Aswaja NU pada saat ini masih mampu menjawab tuntutan perkembangan pemikiran dalam bidang keagamaan yang akhir-akhir ini semakin maju dan rumit? Mungkin untuk konstruksi *fighiyyahnya* Aswaja NU masih bisa "survive" dalam menanggapi perubahan sosial. Akan tetapi kita perlu menengok doktrin

teologis yang menjadi acuan faham Aswaja NU. Secara jujur kita harus mengakui bahwa doktrin teologis merupakan *domain* yang tidak fleksibel sebagaimana fikih. Teologi penuh dengan klaim-klaim kebenaran dan kekafiran. Ciri dari doktrin teologi di manapun adalah berupa kekakuannya dalam mempertahankan ide bahwa sistem teologi sendirilah yang paling benar. Karena pengakuan yang demikian merupakan hal yang harus dilakukan demi pembelaan terhadap teologi tertentu.

Rigiditas teologis semacam itu tidak terlepas dari Aswaja NU. Dalam kondisi yang dilematis ini muncul dua pilihan. Pertama, apakah NU akan tetap berpegang kepada Aswaja dalam rumusan seperti di atas. Ataukah NU melakukan kritik ulang terhadap rumusan Aswaja yang selama ini berlaku.

Menanggapi dua persoalan itu sebenarnya akhir-akhir ini telah terjadi perdebatan serius dua kelompok dalam NU, antara mereka yang menghendaki peninjauan ulang atas Aswaja dan mereka yang tetap berpegang pada rumusan semula, yakni menganggap cukup Aswaja yang berteologi menurut Asy'ari dan Maturidi, berfikih menurut empat madzhab dan bertasawwuf menurut Junaid al-Baghdadi sebagai landasan kehidupan keagamaan. Kelompok pertama ini diwakili pada umumnya oleh ulama-ulama tua NU seperti KH. Mohammad Dawam Anwar, KH. Rodhi Saleh dan beberapa ulama muda yang berpikiran seperti ulama tua seperti Gus Najih Maimun dari Sarang dan lainnya. Kelompok kedua, ulama yang ingin melakukan rekonstruksi terhadap rumusan Aswaja yang sudah baku tersebut. Kelompok kedua inipun ada yang menghendaki rekonstruksi secara radikal yang diwakili oleh Dr. Said Aqiel Siraj dan ada yang menghendaki rekonstruksi secara pelan-pelan dan moderat yang diwakili oleh Dr. Nur Iskandar al-Baryani.

Kelompok-kelompok di atas sudah melakukan pertemuan dalam suatu halqah yang diadakan langsung oleh PBNU. Dalam halqah tersebut nampaknya yang disepakati syuriah NU, karena mereka rata-rata dari golongan tua, adalah konsep Aswaja yang diajukan oleh ulama tua (KH. Dawam Anwar) dan ulama muda (Nur Iskandar al-Baryani). Meskipun usulan yang diajukan oleh Dr. Said Aqiel tidak mendapat tanggapan bahkan cenderung ditolak namun pada hakekatnya usulan Said Aqiel ini yang perlu diperhatikan untuk pengembangan Aswaja ke depan. Sebab dengan mempertabakan konsep Aswaja NU yang seperti sekarang, NU akan berat menghadapi tantangan-tan-

tangan masa depan.

Tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Aswaja NU bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian. Bagian pertama, tantangan yang berasal dari dalam NU (internal). Bagian kedua adalah tantangan yang berasal dari luar diskursus Aswaja NU (eksternal).

Tantangan yang berasal dari dalam ini berupa kemunculan gelombang pemikiran baru di lingkungan NU. Persinggungan generasi muda NU dengan diskursus modernitas melahirkan corak pemikiran baru yang tetap menguasai hazanah intelektual lama sekaligus apresiatif terhadap berbagai interpretasi baru. Pendukung pemikiran baru tersebut, bisa dipastikan akan semakin besar jumlahnya. Mereka membutuhkan suatu kerangka Aswaja yang kurang lebih "sesuai" dengan wacana keberagaman mereka. Dengan demikian adanya rekonstruksi Aswaja NU adalah sebuah kebutuhan.

Dengan ditolaknya konsep Aswaja yang dilontarkan oleh Said Aqiel sebenarnya NU telah memupus harapan kaum muda NU yang menghendaki pembaharuan Aswaja. Sebab pada dasarnya kehadiran Said Aqiel sendiri merupakan representasi dari gelombang baru pemikiran kaum muda NU tersebut.

Gelombang pemikiran baru kaum muda NU yang menghendaki rekonstruksi Aswaja ini harus disikapi secara bijaksana oleh NU. Kalau fenomena ini tidak ditangani secara bijaksana bisa saja menyebabkan terjadinya polarisasi pemikiran antara golongan tua dan golongan muda. Atau kaum muda NU akan melepaskan sandaran teologi mereka dari Aswaja. Maka jika NU berpihak kepada kaum tua saja dengan tetap bersikukuh dengan konsep Aswaja yang ada, akan muncul perlawanan dari kaum mudanya atau NU akan kehilangan sebagian pendukungnya. NU akan merugi.

Adapun tantangan yang berasal dari luar meliputi: *Pertama*, tantangan Pluralitas Keagamaan. Problem agama saat ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga sudah barang tentu Ahlussunnah Waljama'ah sebagai salah satu firqah dalam Islam akan mendapat tantangan juga. Di antara tantangan yang paling serius bagi Aswaja Nahdlatul Ulama adalah mengenai memecahkan persoalan pluralitas keagamaan. Bisakah NU menghadapi tantangan pluralisme keagamaan sedangkan dalam dirinya masih berkecamuk pergolakan internal yang tidak kunjung habis. Diskursus yang masih gencar di kalangan masyarakat NU sampai kini, misalnya, adalah mencari perbedaan mana

golongan yang benar (*firqah najiyah*) dan mana yang tidak benar. Saling menegasikan antara satu kelompok dengan kelompok lain masih sering terjadi. Bahkan muncul isu bagaimana merumuskan Aswaja versi NU agar kelompok keagamaan lain tidak masuk. Jadi mengupayakan NU sebagai satu-satunya *firqah najiyah* seperti itu jelas sudah tidak sesuai lagi dengan misi Islam sebagai *rahmatul lil alamin*.

Pluralitas keagamaan tersebut merangkum; pertama, pluralitas faham keagamaan dalam Islam (bersifat internal) seperti Aswaja *vis a vis* Syi'ah, Mu'tazilah *vis a vis* Ahmadiyah atau persoalan NU dengan Muhammadiyah, Persis, Perti dan lain sebagainya. Kedua, pluralitas keagamaan antara Islam dan non Islam (bersifat eksternal) misalnya Aswaja versus Kristen, Budha, Hindu bahkan aliran kepercayaan dan sekte-sekte di luar Islam. Akankah doktrin Ahlussunnah Waljama'ah masih memperlihatkan doktrinnya yang kaku?

Sungguh ini merupakan tugas yang maha berat bagi pengembangan teologi Aswaja NU di masa-masa mendatang. Wacana keagamaan sudah berkembang begitu jauh sehingga yang diurusinya tidak hanya sekedar melakukan penilaian apakah suatu firqah bertentangan dengan firqah yang lain. Perkembangan wacana keagamaan Islam sekarang sudah dihadapkan pada proses dialog antar agama yang tidak lagi mencari mana yang benar dan mana yang tidak benar, akan tetapi mencari titik persamaan di antara mereka.

Tantangan pluralitas keagamaan dalam Islam misalnya, bagaimana Aswaja NU menghadapi persoalan klaim benar-salah yang terjadi antara firqah satu dengan firqah lainnya. Ambil saja contoh pengklaiman Aswaja terhadap Syi'ah sebagai madzhab yang salah baik secara teologis, kultural, sosial maupun politik. Bagaimanakah kita bisa mengklaim Syi'ah sebagai firqah yang sesat sedangkan kalau kita lihat sekarang pengikut Syi'ah mengalami kemajuan demikian pesat. Kasus Iran misalnya, kalau kita mau jujur, tidak ada satupun negara Islam di dunia yang dalam memegang prinsip sekuat Iran. Selain itu, Iran mengalami keberhasilan dalam menata kehidupan negaranya. Dalam bidang pengembangan keagamaanpun Iran untuk saat sekarang merupakan *avant gardis* apabila dibandingkan dengan negara-negara yang *note bene* sunni seperti Saudi Arabia atau Mesir. Dalam fora internasionalpun suara Iran sering lantang menyuarakan kepentingan umat Islam yang selama ini masih ditindas. Kita dapatkannya hal

yang demikian pada negara-negara Islam sunni? Sudah barang tentu, kita susah mengatakan bahwa kenyataan Iran sebagai negara Islam Syi'ah yang demikian besar perhatiannya terhadap keluhuran Islam bukan merupakan refleksi dari ajarannya yang baik pula.

Tantangan pluralitas keagamaan antara Islam Aswaja dengan non-Islam juga harus dicarikan jalan keluarnya. Sebagai sebuah organisasi keagamaan Islam yang paling besar di Indonesia, NU seharusnya mempunyai rumusan yang jelas mengenai sikap Aswaja terhadap keberadaan agama non Islam.

Pandangan yang *committed* terhadap suatu sistem teologi tertentu kini sedang mengalami kritikan pedas karena sering menimbulkan korban. Kesetiaan terhadap satu teologi tertentu seringkali mengharuskan menegasikan keberadaan teologi lain. Bahkan upaya-upaya pelenyapanpun seringkali dilakukan demi kejayaan teologinya sendiri. Buktinya teologi sering mengeksklusi orang yang berteologi lain dari keselamatan umum yang dijanjikan oleh agama. Sebagai misal, pengikut teologi Asy'ari akan selalu mengkafirkan penganut teologi Mu'tazilah, demikian juga sebaliknya. Persoalan saling kafir mengkafirkan ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Islam menghendaki keselamatan semua ummatnya. Islam selalu mengajarkan kebaikan, perdamaian, menghargai pendapat bahkan agama orang lain. Lalu mengapa teologi, yang menjadi salah satu pilar Islam, justru berbuat saling mengkafirkan tidak hanya terhadap pemeluk agama lain akan tetapi terhadap sesama Islam. Mengapa teologi sampai bisa mengatasi Islam yang universal?

Ini semua harus dipikirkan kembali demi kemaslahatan dan kelanggengan Aswaja. Agenda kita adalah bagaimana menjadikan Aswaja sebagai sebuah faham keagamaan Islam yang memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pemikiran teologis tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu akan tetapi untuk kepentingan ummat manusia secara keseluruhan.

Kedua, tantangan Demokratisasi. Sebagaimana diketahui demokrasi merupakan konsep politik yang diakui relatif lebih mampu menciptakan tatanan masyarakat yang baik daripada sistem politik yang lain. Ia dinilai bisa mengantarkan suatu masyarakat menuju alam keadilan dan kesejahteraan. Maka demokratisasi menjadi "gerbong" yang harus dipercepat lajunya termasuk oleh NU.

Problemnya, demokrasi sebagai wacana politik seringkali bersinggungan dengan

konsep-konsep keagamaan. Ketersinggungan ini sangat terlihat dalam diskursus mengenai konsep otoritas tertinggi dalam negara. Dalam konsep negara demokrasi otoritas tertinggi adalah di tangan mayoritas warga negara yang diwakili oleh dewan-dewan perwakilan rakyat. Apa yang diputuskan mayoritas warga itulah yang harus diikuti. Dengan kata lain, demokrasi adalah konsep sekular karena di sana intervensi agama tidak diperhitungkan. Dalam konsep Aswaja negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada otoritas Islam, al-Qur'an dan hadis. Otoritas manusia harus tunduk kepada otoritas agama.

Perdebatan mengenai otoritas tertinggi dalam suatu negara ini belum pernah mendapat penyelesaian yang memuaskan. Terjadi perdebatan seru antara pembela otoritas religius dengan otoritas sekular. Maududi, misalnya, mengakui otoritas manusia, namun hakikat tertinggi tetap dikembalikan kepada agama. Maududi menyebutnya dengan istilah teodemokrasi. Secara gampang bisa diartikan demokrasi yang diatur oleh teks-teks ketuhanan (*the divine text*). Sementara di pihak lain, Ali Abdurraziq berbuat yang sebaliknya. Agama sama sekali tidak ingin mencampuri urusan otoritas kenegaraan. Semuanya yang berkaitan dengan kenegaraan diserahkan kepada manusia untuk memikirkan dan mengelolanya. Tentu yang terahir ini bukan jawaban yang tepat.

Masalah lain yang menjadi tantangan Aswaja adalah mengenai demokratisasi ekonomi. Penyebab dari kemiskinan dan kemelaratn pada dasarnya adalah tidak jalannya konsep demokrasi ekonomi dalam menata sumber daya negara. Dalam konteks negara kita, penduduk yang berada pada garis kemiskinan adalah mayoritas pengikut Aswaja NU.

Tuntutannya kemudian bagaimana NU sebagai wujud pelebagaan Aswaja bisa ikut serta dalam memecahkan kemiskinan ini. Maka *pe er* bagi NU selanjutnya adalah memberikan formulasi Aswaja yang berguna bagi penyelesaian ketegangan demokrasi-pemahaman "sementara" konsep politik Islam sembari menawarkan landasan teologis bagi demokratisasi.

Ketiga, tantangan HAM. Yang dimaksud dengan tantangan hak asasi manusia di sini adalah segala hal yang harus dihadapi oleh Aswaja berkenaan dengan hak-hak dasar manusia dan usaha demi dihormatinya hak-hak tersebut. Dalam Aswaja wacana mengenai hak dasar manusia memang sudah menjadi pembahasan lama. Hak-hak dasar tersebut

meliputi hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak atas kekayaan, dan hak berketurunan.

Hak-hak dasar dalam Islam di atas sebenarnya sudah mencakup hak-hak asasi manusia secara umum. Tapi di samping hak-hak manusia yang bersifat religius tersebut ada "jenis" hak-hak manusia lainnya bersifat sekular yang keberadaannya ditentukan oleh masyarakat dunia (Declaration of Human Right) melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sudah barang tentu di sini terjadi pergumulan yang serius antara hak asasi manusia yang ditentukan oleh agama dan hak asasi yang ditentukan dan disepakati oleh umat manusia. Pergumulan tersebut berkisar kepada universalitas keberlakuan HAM internasional versus nilai-nilai agama. Mana yang lebih universal apakah konsep HAM internasional ataukah konsep HAM yang dikembangkan oleh agama. Misalnya, bagaimana tanggapan Aswaja menghadapi persoalan hak konversi agama. Orang yang pindah agama tersebut dalam bahasa fikih disebut dengan istilah murtad. Dalam semua teks keagamaan Islam terutama Aswaja, hukuman bagi orang yang murtad tidak lain adalah mati. Padahal mencabut nyawa seseorang jelas bertentangan hak hidup yang dimiliki oleh setiap orang secara fitri yang mana hal ini secara jelas diakui oleh HAM sedunia. Dalam Deklarasi HAM sedunia pasal 2 dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan dirinya".

Soal lain adalah mengenai diskriminasi hak antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam fikih, antara pemeluk Islam dan nonIslam menduduki posisi kelas yang berbeda dalam strata masyarakat Islam pada umumnya. Pemeluk Islam menduduki posisi kelas utama sedangkan non Islam menduduki kelas kedua. Perlakuan diskriminatif yang demikian ini sering menjadi sumber konflik ini sedang diusahakan oleh dunia internasional untuk dihapuskan. Bagaimana Aswaja NU menghadapi problem yang demikian serius ini. Dalam studinya yang sangat menarik, An-Na'im melihat hal ini sebagai isu yang sangat kontroversial bagi fikih *vis a vis* hukum publik internasional.

Dalam kasus yang lain, dan ini yang lebih konkrit, adalah masih terjadinya diskriminasi yang berdasarkan pada perbedaan kelamin. Sudah menjadi rahasia umum hak asasi kaum perempuan dalam Islam apalagi dalam fikih Aswaja telah diabaikan. Kaum perempuan adalah warga kelas dua setelah laki-laki. Dengan kata lain hak mereka adalah separoh dari hak manusia laki-laki. Perempuan tidak berhak

menentukan nasibnya sendiri dalam karir pekerjaan, pendidikan, sikap politik bahkan teman pendamping hidupnya (*ijbar*).

Tantangan perjuangan persamaan hak dan martabat antara kaum laki-laki dan perempuan atau sering disebut dengan istilah kesetaraan gender ini tidak kalah penting dari tantangan demokratisasi dan HAM. Bahkan ada sementara pihak yang menggunakan tolok ukur untuk menilai rendahnya mutu demokrasi dan HAM di negara-negara Islam berhaluan Aswaja dengan indikasi rendahnya penghargaan hukum Islam terhadap perempuan.

Sebenarnya dari jauh-jauh hari mengenai kedudukan kaum sudah diantisipasi oleh NU apabila kita lihat 10 pasal program perjuangan NU. Dalam pasal 9 disebutkan dengan jelas:

"Melindungi hak-hak kaum wanita, membendung segala bentuk usaha-usaha yang mengakibatkan kemerosotan moral dan yang merendahkan martabat Wanita Indonesia".

Namun sayangnya program perjuangan NU yang sangat memberdayakan kaum perempuan tersebut tidak ditindaklanjuti secara nyata. Dalam persoalan pendidikan perempuan dianggap tidak terlalu penting untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak seperti yang didapatkan kaum laki-laki. Yang penting bagi perempuan adalah belajar hal-hal yang diwajibkan (*mafrudhat*) agama dan hal-hal yang kelak menjadi bekal hidup berumah tangga. Hal ini tercermin dalam fenomena munculnya pesantren putri yang kira-kira baru 20 tahunan yang lalu. Sebelum itu hampir tidak dikenal lembaga pendidikan agama seperti pesantren yang khusus mendidik kaum perempuan.

Sekarang perempuan sudah mendapat pelayanan pendidikan yang hampir bisa dikatakan *equal* dengan yang didapatkan oleh laki-laki sebagai sama-sama hamba Allah yang diciptakan dalam kedudukan yang sederajat. Namun perbaikan dalam bidang pendidikan belum disertai perbaikan perlakuan dan kesan terhadap kaum perempuan. Anggapan kaum perempuan sebagai makhluk yang kurang (*naqishaat*) masih seringkali terlontar dalam forum-forum publik keagamaan. Kaum perempuan masih dipinggirkan dalam kepemimpinan publik dan masih banyak lagi kasus-kasus sejenis yang lain.

Di samping kasus-kasus tersebut masih ada agenda lain yang segera dirumuskan bagaimana Aswaja mempunyai rumusan yang tepat dalam melindungi masyarakat kecil yang termarginalisasi karena korban kekuasaan. Kemiskinan, kemelaratan dan hilangnya hak-hak sipil oleh kekuasaan harus menjadi perha-

tian utama doktrin teologi Aswaja. Dalam hal ini, Aswaja perlu belajar kepada teologi pembebasan di Amerika Latin.

Menjawab Tantangan

Tantangan-tantangan di atas, baik internal maupun eksternal, pada dasarnya sudah diresponi oleh NU terutama di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid. Harus diakui bahwa kepemimpinan Gus Dur telah mampu memompa semangat intelektualisme baru di kalangan kaum mudanya. Pada satu sisi ini menjadi keuntungan bagi NU, tapi pada sisi lain menimbulkan ketegangan pada tataran elitnya. Kebangkitan gelombang baru pemikiran kaum muda NU tersebut justru menimbulkan kecemasan bahkan resistensi di kalangan tua. Dan kecemasan itu benar-benar datang ketika Said Aqiel Siraj mengusulkan agar di lingkungan NU melakukan *self criticism* berkenaan dengan teologi Aswaja. Bahkan dengan ditolaknya gagasan pembaharuan Aswaja yang dikemukakan oleh Said Aqiel Siraj ini berarti telah membunuh semangat *renaissance* yang selama ini kita tunggu-tunggu kemunculannya. Sebab kemunculan dari gelombang baru ini juga merupakan *direct effect* dari diskursus yang diciptakan oleh Gus Dur sendiri. Mengapa harus dicemasi?

Rupanya kecemasan kalangan tua atas usulan rekonstruksi Aswaja yang dilontarkan oleh kalangan muda itu lebih dilatarbelakangi kekhawatiran mereka terhadap eksistensi Aswaja sendiri. Kira-kira dalam pikiran mereka mungkin terbayang sebuah pertanyaan apakah dengan rekonstruksi malah tidak menyebabkan lunturnya Aswaja?

Kecemasan yang berlebihan seharusnya tidak perlu terjadi. Bangkitnya gelombang baru pemikiran kaum muda NU bukannya tanpa bekal dan persiapan. Bekal itu berupa penguasaan yang tinggi terhadap "tradisi". Nurcholish Madjid pernah mengakui bahwa suatu saat memang motor pembaharuan pemikiran Islam akan diambil oleh kelompok yang lebih menguasai tradisi.

Propaganda terhadap isu-isu toleransi terhadap firqah non Aswaja, dialog antar agama lain, demokratisasi dan HAM selama ini acapkali dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid, selaku pimpinan PBNU, dengan apresiasi yang cukup tinggi. Misalnya, Gus Dur sering mengatakan dalam pelbagai kesempatan bahwa tradisi Aswaja yang dilembagakan oleh NU itu sebenarnya ada kesamaan dengan tradisi yang ada dalam Syi'ah. Dalam hal ini, misalnya, Gus Dur

mengambil contoh mengenai upacara kematian dari 7 harian sampai seribu hari. Tidak hanya itu tradisi pembacaan shalawatpun sangat mirip dengan yang ada di Syi'ah.

Demikian juga penghargaan terhadap pemeluk agama lain mendapat perhatian yang sangat serius oleh Gus Dur. Dalam hal ini Gus Dur bahkan tidak hanya dengan ucapan akan tetapi memberikan suri tauladan bagaimana cara hidup beragama dalam kondisi yang pluralistis. Komitmen Gus Dur terhadap perjuangan HAM dan demokratisasi juga tidak diragukan lagi.

Tapi itikad yang baik dari Gus Dur seringkali tidak mendapat tanggapan positif dari kalangan masyarakat awam atau bahkan oleh kalangan kyai sebagai penjaga ortodoksi. Padahal kyailah yang dekat dengan ummat. Untuk itu yang dilakukan oleh Gus Dur di atas perlu ditindaklanjuti dengan upaya rekonstruksi terhadap hal-hal yang lebih mendasar seperti ajaran teologinya. Upaya rekonstruksi teologis Aswaja ini memang sangat penting untuk menjaga kelanggengan ajaran ini.

Lalu jalan manakah yang harus dilalui dalam rekonstruksi teologis, mengingat status ilmu tersebut dianggap sacral setidaknya oleh kaum pemeluk Aswaja? Hassan Hanafi, seorang intelektual Mesir, misalnya melakukan penafsiran ulang terhadap status keilmuan teologi. Menurutnya, teologi sebetulnya bukan ilmu tentang Tuhan tapi teologi adalah ilmu mengenai manusia itu sendiri. Tanpa terjebak dalam dogma Feurbachian, Hassan Hanafi menyatakan bahwa teologi adalah bukan ilmu mengenai Tuhan sesuai dengan makna etimologinya. Menurutnya, Tuhan tidak akan tunduk kepada ilmu. Lebih jauh ia mengatakan bahwa teologi adalah antropologi ilmu kemanusiaan. Teologi adalah hermeneutika bukan sebagai ilmu yang sakral akan tetapi ilmu sosial buatan manusia. Dalam ilmu ini terrefleksikan konflik-konflik sosial politik. Bagi kelompok masyarakat tertentu akan membaca kepentingan-kepentingannya sendiri serta akan mempertahankan dalam sistem kepercayaannya. Inilah yang Hassan Hanafi sebut dengan istilah teologi.

Dalam sebuah rekonstruksi (pembangunan ulang) lebih dahulu harus dilakukan dekonstruksi (pembongkaran) terhadap bangunan Aswaja NU yang selama ini ada. Dekonstruksi ini penting untuk melihat, memilih dan membedakan mana yang Aswaja NU yang sebenarnya dan mana yang tambahan. Ibarat bumi, Aswaja sudah terdiri dari lapisan-lapisan pemahaman di mana sudah susah untuk

pemahaman di mana sudah susah untuk mendeteksi mana yang Aswaja NU yang sebenarnya dan mana yang bukan. Selain proses penulisan otentisitas dan orisinalitas ajaran Aswaja, dekonstruksi juga membantu untuk memikirkan apa-apa yang belum dipikirkan pada saat itu mengenai paham Aswaja.

Secara umum rekonstruksi tersebut bisa dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. *Pertama*, melakukan perubahan dari hidup bermadzhab secara *qauli* (ucapan) kepada bermadzhab secara *manhaji*. Artinya, apabila selama ini dalam menjalankan kehidupan keagamaan kita hanya mengikuti saja bahkan berusaha manut kepada pendapat atau *qaul* mazhab Aswaja, sudah tiba saatnya bagi kita untuk tidak hanya mengikuti *taqlid qauli* dalam pengertian isinya tersebut, akan tetapi berupaya mengikuti *manhajnya* dalam pengertian metodologinya. Dengan kata lain yang perlu kita ambil dari mazhab-mazhab yang ada, baik teologi, fikih maupun tasawwuf, bukan produknya (ikannya), akan tetapi metode (pancingnya). Misalnya bagaimana kita bisa memakai metodologi Asy'ari dan Maturidi untuk merespon perkembangan teologi kontemporer. Bagaimana pula kita mengambil metodologi pemetikan hukum yang digunakan oleh imam empat, dan lain sebagainya untuk menjawab problematika fikih *vis a vis* perkembangan kontemporer.

Hal ini sebenarnya sudah menjadi keputusan Munas NU di Lampung, tapi implementasinya pada tataran praktik masih belum terlaksanakan. Sebab untuk mengikuti secara metodologis, membutuhkan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia dalam bidang ini. Tanpa kemampuan dan kesiapan taklid secara *manhaji* dengan sendirinya menjadi gugur karena akan menyebabkan timbulnya kekacauan ajaran agama bahkan tidak jarang manipulasi. Persoalan inilah sebenarnya yang sering dinyatakan oleh ulama Nahdlatul Ulama ketika hendak melakukan rekonstruksi. Tapi ini bisa diatasi dengan cara *jama'i* (kolektif).

Kedua, upaya rekonstruksi Aswaja bisa dilakukan melalui cara penafsiran ulang (*re-interpretation*) terhadap teks-teks yang ada. Kalau terjadi kasus hukum, sebagai misal, kita tinggal membuka rujukan-rujukan yang ada kemudian direproduksi lagi dalam bentuk yang baru. Jadi dalam hal ini hanya mencari pendapat-pendapat ulama mengenai kasus-kasus tertentu. Kelemahan dari cara ini adalah kalau sumber

rujukan yang ada secara tekstual tidak pernah menyinggung persoalan yang sedang terjadi maka akibatnya adalah terjadi kevakuman ajaran. Toh, kalau seumpama memaksakan dengan teks yang tersedia (*ready for use*) maka tak jarang terjadi distorsi dari yang dikehendaki. Misalnya, menjawab kasus-kasus kontemporer dengan *ma'khad-ma'khad* kitab-kitab ulama abad pertengahan. Kelemahan lain adalah cara ini tidak mendidik untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Kita akan selalu tergantung dengan persediaan yang ada. Di kala persediaan itu sudah habis, kita belum siap.

Adapun kelebihan dari penggunaan cara demikian memang kita tidak susah payah melakukan penggalian secara langsung terhadap al-Qur'an dan hadis, tapi ini juga membutuhkan keahlian. Meskipun demikian, kualitas sumber daya manusia NU sekarang nampaknya sudah mampu melakukan ini.

Ketiga, upaya rekonstruksi bisa dilakukan melalui proses sinergitas artinya tetap menggunakan rujukan yang ada tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan *manhaj* yang memang bisa digunakan dan tidak terlalu berat. Dalam kasus-kasus fihiyyah sebagai misal, di samping kita menggunakan qiyas (analogi), kita juga masih menggunakan hasil dari karya imam empat madzhab.

Selama ini yang membuat Aswaja mampu bertahan adalah aspek fihiyyahnya. Dalam bidang pengembangan aspek teologi Aswaja NU nampaknya sangat lamban merespon perkembangan zaman. Ketika marak-maraknya dikampanyekannya dialog antar agama Aswaja NU tidak memberikan sumbangan pemikiran apapun. Apalagi dalam perkembangan teologi yang akhir-akhir ini sudah sangat maju pesat dan tidak mungkin kita memalingkan muka darinya. Sumbangan pribadi memang diberikan misalnya oleh Gus Dur, namun itu masih bersifat individual belum kelembagaan. Bahkan setiap upaya yang dilakukan oleh Gus Dur dalam rangka ini masih ada saja yang mencurigai.

Sebagai lembaga keagamaan NU dengan Aswajanya merupakan organisasi sosial keagamaan yang paling besar di Indonesia dalam pengertian jumlah anggotanya. Akan tetapi pada tingkat percaturan diskursus keilmuan, NU boleh dikatakan tidak merupakan yang dominan. Bagaimana agar percaturan diskursus Aswaja bisa dominan. Untuk itu kita perlu memikirkan kembali Aswaja NU kita.